RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM																
II. BIDANG PENATAAN TATA LAKSANA																
TARGET	**INDIKATOR**	**KEGIATAN**	**JAN**	**FEB**	**MAR**	**APR**	**MEI**	**JUN**	**JUL**	**AGU**	**SEP**	**OKT**	**NOV**	**DES**	**DATA DUKUNG**	**INDEX**
1.Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Kementerian Hukum dan HAM di Zoana Integritas WBK/WBBM	a. Prosedur Operasional Tetap	1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada tusi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM :													✓ Dokumen peta bisnis instansi (Pusat)	II.a.1.a
2.Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen Kementerian Hukum dan HAM di Zona Integritas WBK/WBBM		a. Unit Pusat Membuat SOP mengacu pada proses bisnis instansi						1						1	✓ Dokumen SOP Pusat/Unit Eselon I	II.a.1.b
3.Meningkatnya kinerja Zona Integritas WBK/WBBM		b. Wilayah/UPT membuat SOP Unit yang merupakan turunan dari SOP yang diterbitkan oleh Pusat													✓ Dokumen SOP (Wilayah/UPT) yang ditandatangani Kepala	s
		c. Wilayah/UPT membuat SOP Inovasi													Wilayah/UPT	
															✓ Dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Kepala Wilayah/UPT	II.a.1.d
		2) Prosedur operasional Satuan Kerja telah diterapkan :													✓ Capture pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur pelayanan	II.a.2.a
		a. Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP dengan pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan						1						1	✓ Foto kegiatan layanan	II.a.2.b
		3) Prosedur operasional Satuan Kerja apakah telah dievaluasi :														
		a. Melaksanakan Evaluasi SOP					1							1	Dokumen hasil evaluasi serta tindak lanjutnya	II.a.3
		b. Membuat laporan hasil evaluasi SOP														

	b. E-Office	1) Sistem pengukuran kinerja Unit :														
		a. sistem pengukuran kinerja Satuan Kerja (satker) melalui aplikasi e-performance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	capture kinerja satker melalui aplikasi e-performance dan aplikasi SIMPEG.	II.b.1
		b. sistem pengukuran kinerja Individu melalui jurnal harian pada aplikasi SIMPEG														
		2) Sistem manajemen SDM sudah menggunakan aplikasi														
		a. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi SIMPEG NEW 015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	capture manajemen SDM melalui aplikasi SIMPEG NEW 015	II.b.2
		3) Sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi														
		a. Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Capture website, aplikasi layanan serta media sosial	II.b.3
		b. Memiliki website yang memudahkan masyarakat														
		c. Memiliki aplikasi layanan														
		d. Memiliki media sosial														
		4) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik													✓ Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat	II.b.4.a
		a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara bulanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓ Dokumen monitoring dan evaluasi	II.b.4.b
		b. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi														

	c. Keterbukaan informasi publik	1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Perundang-undangan;													✓ Capture anggaran DIPA melalui website	II.c.1.a
		a. menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai (memiliki website yang mudah diakses) ;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓ Capture spanduk/baner, website dan media sosial;	II.c.1.b
		b. penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur,														
		waktu dan biaya) melalui spanduk/baner, website dan media														
		sosial;														
		2) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukan informasi publik.													✓ undangan rapat, notulensi, daftar hadir	II.c.2.a
		a. melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓ dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi	II.c.2.b
		b. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik														